

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Khonsa Syadanna<sup>1)</sup>, Kiagus Zainal Arifin, S.E., M.Si<sup>2)</sup>

<sup>1-2</sup> Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: [Syadannakhonsa@gmail.com](mailto:Syadannakhonsa@gmail.com), [Zainalarifin1434@gmail.com](mailto:Zainalarifin1434@gmail.com).

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, pelaporan, informasi dan komunikasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, dan pemantauan kualitas laporan. Pemerintah Kota Prabumulih membiayai dan menentukan dampak pengendalian, pengendalian, pengendalian, dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih secara bersamaan. Populasi penelitian ini terdiri dari 28 OPD Kepala OPD Kota Prabumulih, Bendahara OPD, Tata Usaha Barang, dan Tata Usaha Keuangan. Dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada kepala OPD, bendahara OPD, administrasi barang, dan administrasi keuangan di 28 OPD Kota Prabumulih, penelitian ini mengumpulkan data primer. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 112 kuesioner, 96 di antaranya dikembalikan. Strategi pemilihan sampel adalah sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda untuk analisisnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, dampak, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Prabumulih, sedangkan lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan juga berdampak positif. Prabumulih sangat penting untuk kualitas laporan keuangan pemerintah.

**Kata Kunci :** Sistem Pengendalian Intern, Kualitas, Laporan Keuangan.

*Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of implementing a control environment on the quality of the Prabumulih City Government financial reports, the impact on the quality of the Prabumulih City Government financial reports, the control of the quality of the Prabumulih City Government financial reports, information and communication on the quality of the Prabumulih City Government financial reports, and the monitoring of report quality. Prabumulih City Government finances and determining the impact of control, control, control, and communication on the quality of Prabumulih City Government financial reports concurrently. This study's population consists of 28 OPD Prabumulih City's head of OPD, OPD treasurer, goods administration, and finance administration. Using a questionnaire sent to the heads of OPD, treasurer of OPD, goods administration, and financial administration in 28 OPD Prabumulih City, this study collects primary data. There were a total of 112 distributed questionnaires, of which 96 were returned. The strategy for selecting samples is saturated sample. This study used the approach of multiple linear regression analysis for its analysis. The findings of this study indicate that the control environment, impact, control activities, information and communication, and partial control have a positive and statistically significant effect on the quality of the financial statements of the Prabumulih City government, while the control environment, control activities, information and communication, and monitoring also have a positive impact. Prabumulih is essential to the quality of the government's financial statements.*

**Keywords:** Internal Control System, Quality, Financial Statements.

### PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat dan hal tersebut merupakan fenomena besar dalam ranah Akuntansi Sektor Publik. Tuntutan ini secara khusus mengacu kepada bidang pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan yang berkualitas secara transparan dan akuntabel sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Memenuhi Prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku serta dapat diterima secara umum merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. “Namun kualitas laporan keuangan di Indonesia masih terdapat berbagai masalah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah dalam situasi seperti ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi (www.Republika.co.id,2018)”.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

“Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu instrumen penting yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengoptimalisasian Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”. Dalam Sistem Pengendalian Intern terdapat unsur-unsur yang menjadi tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. “Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Unsur Sistem Pengendalian Intern terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Unsur Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah”.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya disebut BPK menyelenggarakan tiga jenis pemeriksaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus. Segera setelah selesainya pelaksanaan pemeriksaan, BPK menyusun hasil pemeriksaan dan menyajikannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan menghasilkan opini. Jenis opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2020).”

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kota Prabumulih memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut terhitung sejak tahun pelaporan 2013 hingga 2020. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan

Pemkot Prabumulih tahun 2020, BPK menemukan kekurangan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Pengelolaan kas di lingkungan Pemkot Prabumulih tidak teratur, mengancam pengendalian kas dan berpotensi menyelewengkan dana daerah.
2. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga penyajian saldo kas BOS per 31 Desember 2020 menjadi tidak akurat, serta pengeluaran barang dan jasa yang berlebihan. dan kurang saji belanja modal sebesar Rp811.275.039.00;
3. Belum terhimpunnya potensi penerimaan pajak penerangan jalan non-PLN sehingga Pemerintah Kota Prabumulih tidak dapat segera memanfaatkan paling sedikit Rp1.908.431.258,85 potensi penerimaan pajak penerangan jalan non-PLN;
4. Pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 151.887.314.00 untuk perjalanan dinas; 5. Pengeluaran biaya pemeliharaan kendaraan bermotor di Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 60.900.469.00 untuk perawatan kendaraan bermotor;
5. Terdapat kekurangan volume pada 50 paket pekerjaan belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.328.478.517,52;
6. Realisasi belanja tak terduga berupa penyaluran barang sembako di Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan sosial berupa barang sembako berisiko tidak tepat sasaran dan pemborosan pada paket sembako yang rusak;
7. Penatausahaan aset tetap Kota Prabumulih belum memadai sehingga mengakibatkan Laporan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, saldo akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap belum disajikan secara andal, serta meningkatkan resiko penyalahgunaan aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih.

Walaupun kemampuan Pemerintah Kota Prabumulih dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut dianggap baik, namun dengan adanya temuan BPK mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di ungkap di Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih ini sangat menarik untuk di pelajari lebih lanjut.

Hasil wawancara bersama Bapak Setiawan, SH selaku auditor pertama penata tingkat 1-III d yang berkerja pada Kantor Inspektorat Kota Prabumulih menyatakan bahwa hasil temuan BPK mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diungkapkan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan setiap kelemahan yang ada dalam komponen Sistem Pengendalian Intern memberikan kontribusi terhadap temuan BPK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek, populasi, tempat dan waktu yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut juga penulis tertarik untuk meneliti mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih dengan variabel yang

akan diteliti yaitu 5 unsur Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner pada populasi penelitian yaitu 28 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Prabumulih dengan responden tiap tiap OPD berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Bendahara OPD, Penatausahaan Barang dan Penatausahaan Keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Variabel dependen penelitian adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih serta variabel independen yakni, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan memiliki definisi operasional variabel penelitian yang dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1  
 Definisi Operasional Variabel Penerapan Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih (Y)

Variabel	Dimensi	Indikator	Perayaan Anemioner	Skala
<b>Variabel Dependen</b>				
Sistem Pengendalian Intern	1. Lingkungan Pengendalian (X1)	1. Penetapan wewenang dan tanggung jawab 2. Praktik kode etik 3. Perencanaan dan pemertanian kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	1 s/d 4	Interval
	2. Penilaian Risiko (X2)	1. Menganalisis risiko 2. Analisis risiko	5 s/d 6	Interval
	3. Kegiatan Pengendalian (X3)	1. Pembaharuan tugas 2. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 3. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	7 s/d 9	Interval
	4. Informasi dan Komunikasi (X4)	1. Informasi yang relevan 2. Komunikasi yang efektif	10 s/d 11	Interval
	5. Pemantauan (X5)	1. Pemantauan berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah	12 s/d 14	Interval
<b>Variabel Independen</b>				
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan	1. Ketepatan waktu 2. Kelengkapan penyajian	1 s/d 2	Interval
	2. Andal	1. Ketajuran 2. Bebas dari kesalahan material 3. Dapat diverifikasi	3 s/d 5	Interval
	3. Dapat diandalkan	1. Keterbandingan	6	Interval
	4. Dapat dipahami	1. Tingkat pemahaman pengguna	7	Interval

Sumber: data yang diolah, 2022

## Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasinya yaitu, OPD yang ada di Pemerintah Kota Prabumulih yang berjumlah 28 OPD. Penarikan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Hal ini berarti sampel yang digunakan adalah populasi penelitian. Yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu Ketua OPD, Bendahara OPD, Penatausahaan Barang dan Penatausahaan Keuangan pada masing- masing OPD.

## Teknik Analisis Data

Aplikasi SPSS dipergunakan dalam penelitian ini, yangmana guna mencari tau keterikatan antar variabel sehingga analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berpedoman pada kuesioner yang telah dikumpulkan, berdasar pada 112 kuesioner yang telah responden terima, terdapat 96 kuesioner yang bisa didapatkan serta bisa dilakukan pengolahan sebanyak 85,7% dari 100% total kuesioner yang terkumpul.

## Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lingkungan Pengendalian	96	13	20	17.83	1.799
Penilaian Risiko	96	4	10	8.44	1.177
Kegiatan Pengendalian	96	7	15	13.19	1.510
Informasi dan komunikasi	96	6	10	8.54	1.035
Pemantauan	96	8	15	12.71	1.562
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih	96	24	35	32.00	3.159
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data diolah, Excel (2022)

Demikian medio nilai dari seluruh tingkatan yakni 0,8, dengan intervalnya yakni:

- 1,0 – 1,8 : Sangat Rendah
- 1,8 – 2,6 : Rendah
- 2,6 – 3,4 : Rata-rata
- 3,4 – 4,2 : Tinggi
- 4,2 – 5,0 : Sangat Tinggi

Hasil tanggapan rata-rata berpedoman pada jawaban dari seluruh responden kuesioner disajikan di tabel 3. Penjelasan dari penilaian pengukuran variable.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

No	Variabel	Dimensi	Nomor pertanyaan	Skorrata-rata	Kriteria
1	Lingkungan Pengendalian	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab	1	4,60	Sangat Tinggi
		Praktik Kode Etik	2	4,60	Sangat Tinggi
		Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	3 dan 4	4,29	Sangat Tinggi
2	Penilaian Risiko	Manajemen risiko	5	4,18	Tinggi
		Analisis risiko	6	4,26	Sangat Tinggi
3	Kegiatan Pengendalian	Pemisahan tugas	7	4,30	Sangat Tinggi
		Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	8	4,49	Sangat Tinggi
		Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	9	4,40	Sangat Tinggi
4	Informasi dan Komunikasi	Informasi yang relevan	10	4,30	Sangat Tinggi
		Komunikasi yang efektif	11	4,24	Sangat Tinggi
5	Pemantauan	Pemantauan berkelanjutan	12 dan 13	4,21	Sangat Tinggi
		Evaluasi Terpisah	14	4,28	Sangat Tinggi
6	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih	Relevan	1 dan 2	4,64	Sangat Tinggi
		Andal	3, 4, dan 5	4,51	Sangat Tinggi
		Dapat Dibandingkan	6	5,00	Sangat Tinggi
		Dapat Dipahami	7	5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Data Diolah Excel (2022)

Rata-rata variabel independen serta dependen mempunyai klasifikasi indikator ukur yang sangat tinggi, terdapat 1 indikator yang diklasifikasikan tinggi, untuk kategori tinggi terletak di dimensi manajemen risiko.

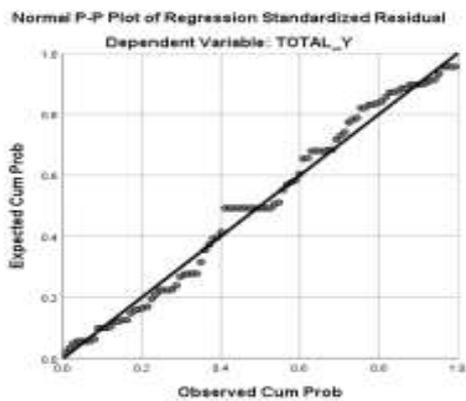
### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

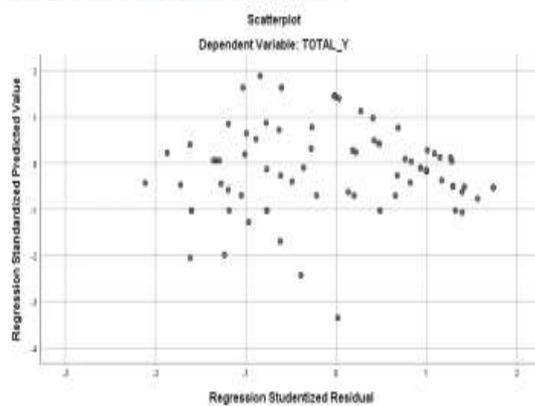
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35951748
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.071
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah Output SPSS 26 (2022)

Pada tabel 4 memberikan data hasil pengujian yang merupakan temuan dari penerapan statistik *One Sample Kolmogorof Smirnov Test*, yang mana data itu menunjukkan yakni, tingginya Asymp.Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,78. Hal ini membentuk bahwa nilai dari data berdistribusi normal karena data yang diperoleh jika dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 maka lebih tinggi.



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Residual**



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Lingkunan Pengendalian	0,495	2,020	Tidak terjadi multikolinieritas
Penilaian Risiko	0,458	2,181	Tidak terjadi multikolinieritas
Kegiatan Pengendalian	0,636	1,572	Tidak terjadi multikolinieritas
Informasi dan Komunikasi	0,678	1,475	Tidak Terjadi multikolinieritas
Pemantauan	0,491	2,035	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data diolah, Output SPSS 26 (2022)

**Tabel 7. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	419,104	5	83,821	14,263	,000 <sup>b</sup>
	Residual	528,896	90	5,877		
	Total	948,000	95			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y  
 b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X5, TOTAL\_X3, TOTAL\_X4, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2

Sumber : Data diolah, Output SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan VIF memiliki angka yang lebih kecil dari 10 serta lebih besar dari 0,1, maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadinya multikolinieritas dalam penelitian yang telah dilaksanakan.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastis

Variabel	Sig.	Absolut Residual	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,473	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penilaian Risiko	0,344	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kegiatan Pengendalian	0,394	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Informasi dan Komunikasi	0,656	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemantauan	0,377	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, Output SPSS 26 (2022)

Pada tabel 6 dapat diperhatikan probabilitas signifikansinya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berpedoman pada tabel 7 menyajikan sebuah skema nilai F hitung yakni, sebesar 14,263 serta signifikansi dengan nilai 0,000. Demikian menjelaskan F hitung memiliki nilai yakni 14,263 yang mana lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel yakni 2,31 serta Tingkat dari signifikansi memiliki nilai 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05 demikian dapat ditarik kesimpulan yakni, variabel independen (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan .

Tabel 8. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,029	2,844		3,174	,002
Lingkungan Pengendalian	,686	,197	,390	3,488	,001
Penilaian Risiko	,737	,312	,274	2,360	,020
Kegiatan Pengendalian	,564	,207	,270	2,731	,008
Informasi dan Komunikasi	,328	,292	,108	2,126	,041
Pemantauan	,529	,227	,261	2,328	,022

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Sumber: Data diolah, Output SPSS 26 (2022)

Hasil dari uji signifikan parsial (uji t) pada tabel di atas bisa diberikan pejabaran yakni:

1. Variabel Lingkungan Pengendalian (X1) nilai thitung sebesar 3,488 lebih besar dari nilai ttabel 1,98667 dengan tingkat signifikansi sebanyak 0,001 lebih sedikit dari 0,05 berarti Ha bisa diterima dan Ho tidak diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Pengendalian (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.
2. Variabel Penilaian Risiko (X2) nilai thitung sebesar 2,360 lebih besar dari nilai ttabel 1,98667 dengan signifikansi yang tingkatnya setinggi 0,020 lebih rendah dari 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Penilaian Risiko (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Variabel Kegiatan Pengendalian (X3) nilai dari thitung setinggi 2,731 lebih rendah jika dibandingkan dengan ttabel 1,98667 yakni memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni, variabel Kegiatan Pengendalian (X3) secara parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

4. Variabel Informasi dan Komunikasi (X4) nilai thitung sebesar 2,126 lebih besar dari nilai ttabel 1,98667 dengan signifikansi yang tingkatnya setinggi 0,041 lebih rendah dari 0,05 sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Informasi dan Komunikasi (X4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Variabel Pemantauan (X5) nilai thitung sebesar 2,328 lebih besar dari nilai ttabel 1,98667 dengan signifikansi yang tingkatnya setinggi 0,022 lebih rendah dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pemantauan (X5) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

**Pembahasan dari hasil uji simultan dan uji parsial dapat dijabarkan sebagai berikut:**

#### **Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, karena thitung sebesar 3,488 lebih besar dari nilai ttabel 1,98667 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya semakin tinggi lingkungan pengendalian maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.. Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel lingkungan pengendalian dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga semakin tinggi lingkungan pengendalian yang diterapkan maka akan semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Carolus Askikarno Palalangan (2019) dan Meri Susanti (2020) yang menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), yang menunjukkan bahwa penilaian risiko berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih meningkat secara proporsional terhadap penilaian risiko. Semakin tinggi penilaian risiko yang diterapkan, semakin tinggi penilaian risiko. Laporan keuangan Kota Prabumulih berkualitas tinggi.

Tuti Herawati (2014) dan Ninda Armarini (2018) juga melakukan penelitian ini dan menemukan bahwa penilaian risiko mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), yang menunjukkan bahwa tindakan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tindakan pengendalian. Menurut data distribusi frekuensi untuk variabel aktivitas kontrol dimana rata-rata tingkat pencapaian responden berada pada kategori baik, maka aktivitas kontrol akan semakin besar semakin banyak aktivitas kontrol yang dilakukan. meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kota Prabumulih.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Yunita Sari (2017) dan BRM. Suryo Triono dan Septiana Novita Dewi (2020), yang menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih meningkat seiring dengan membaiknya informasi dan komunikasi. Dengan meneliti distribusi frekuensi data untuk variabel informasi dan komunikasi dimana rata-rata tingkat pencapaian responden untuk variabel tersebut berada pada kategori baik, maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih akan meningkat secara proporsional dengan tingkat informasi dan komunikasi yang diterapkan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Carolus Askikarno Palalangan (2019) dan Tuti Herawati (2014), yang menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Monitoring berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sesuai dengan hasil uji parsial (uji t), karena thitung lebih besar dari ttabel dengan tingkat signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengawasan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Berdasarkan data distribusi frekuensi dengan variabel monitoring dimana rata-rata tingkat pencapaian responden untuk variabel-variabel tersebut berada pada kategori baik, semakin besar monitoring yang digunakan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Meri Susanti (2020) dan Yunita Sari (2017), menunjukkan bahwa pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih**

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, dan Monitoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, artinya semakin tinggi Control Environment, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Semakin banyak variabel Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, dan Monitoring dimana rata-rata tingkat keberhasilan responden

berada pada kategori baik maka semakin besar Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan kepada uji hipotesis serta hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan dan diuraikan diatas, sehingga menghasilkan kesimpulan yakni:

1. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya lingkungan pengendalian pada Pemerintah Kota Prabumulih mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
2. Hasil penelitian ini menetapkan bahwa penilaian risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya penilaian risiko yang dilakukan pada Pemerintah Kota Prabumulih akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga penilaian risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan pengendalian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya kegiatan pengendalian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Prabumulih akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa informasi dan komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya informasi dan komunikasi yang dilakukan pada Pemerintah Kota Prabumulih akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemantauan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya pemantauan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Prabumulih akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.
6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal tersebut mempunyai arti bahwa baik atau tidaknya sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Pemerintah Kota Prabumulih akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga sistem pengendalian intern yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan.

## REFERENSI

- Alif, Muhammad Ghiffari. 2020. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih. *Skripsi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Amarini, Ninda. 2018. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Arifin, Johar. 2017. *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Edukasi Ragam Opini BPK*. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>. Diakses Pada 5 Februari 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://sumsel.bpk.go.id/>. Diakses pada 1 Maret 2022.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. <https://www.bpk.go.id/ihsps>. Diakses pada 8 Februari 2022.
- Berita Politik <https://www.republika.co.id/berita/p879mh335>. Diakses pada 2 Februari 2022.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi kesembilan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star-Study & Accounting Research Volume XI Nomor 1*.
- Laurenza, Stella. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Monika, Yuyun Okta. 2018. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. *Skripsi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Ningrum, Khoirina Kencana. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Palalangan, Corolus Askikarno. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kaus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume 4 Nomor 2*.
- Sari, Yunita. 2017. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu). *Skripsi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Tesis jurusan S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Ed.* Bandung : ALFABETA, cv.
- Sundari, Heni dan Sri Rahayu. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *E-Proceeding Of Management Vol. 6 No. 1.*
- Susanti, Meri. 2021. Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas Se-Kabupaten Ponorogo). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.*
- Triono, BRM. Suryo, Septiana Novita Dewi. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Volume 21 Nomor 01.*
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara.* Jakarta: Sekertariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.* Jakarta: Sekertariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Website Resmi <https://www.kotaprabumulih.go.id/>. Diakses Pada 8 Febuari 2022.